



# Serahkan Bansos Bahan Pangan untuk Warga Kayong Utara

**SUKADANA, SP** - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan bantuan sosial (Bansos) paket bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, dan mitigasi dampak inflasi di Kayong Utara, Jumat (4/11). Penyerahan paket bantuan sembako dilakukan pada dua kecamatan yakni Simpang Hilir dan Sukadana.

"Hari ini saya menyerahkan bantuan (bahan pangan), kebetulan kemarin BBM (Bahan-bakar Minyak) naik. Pemerintah mengalihkan subsidi, subsidi yang dialihkan salah satunya untuk masyarakat, lewat bantuan sosial," ucap Sutarmidji saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Kayong Utara dan

Ketapang, Jumat (4/11). Awalnya untuk seluruh Kalbar, hanya ada dua ribu paket bahan pangan yang disiapkan Pemprov. Tapi karena Kalbar berhasil meraih peringkat pertama dalam pengendalian inflasi, maka mendapat hadiah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10,83 miliar.

"Dari dana tersebut sebanyak Rp6 miliar, kembali digunakan untuk bansos paket bahan pangan. Alokasinya se-Kalbar ada sebanyak 250-300 paket per kecamatan," jelas Sutarmidji.

Sebelumnya Pemprov Kalbar menjadi satu di antara 10 daerah di Indonesia

yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Atas capaian tersebut, Pemprov Kalbar mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp10,83 miliar dari Kementerian

Keuangan. Sutarmidji mengungkapkan Pemprov Kalbar menjadi daerah yang mendapatkan in-

• **Baca Halaman 11**



**SERAHKAN BANTUAN** - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan bantuan paket bahan pangan di Kabupaten Kayong Utara untuk pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi.

## Hal 9 ■ serahkan bansos

sentif tertinggi dari pusat. Selain itu tiga daerah yang masuk dalam perhitungan inflasi di Kalbar seperti Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang juga mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

"Sebagian besar nanti dana insentif tersebut tetap akan kita gunakan untuk pengendalian inflasi, terutama untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu," ucap Sutarmidji.

Sutarmidji menyebutkan dalam pengendalian inflasi pemerintah daerah harus jeli

melihat program yang pas. Pertimbangannya bisa melihat situasi dan kondisi wilayah atau daerah masing-masing.

"Kalau saya (Kalbar) ambil dua, pertama di pasar kita lakukan operasi pasar, tiap minggu cek harga yang mana yang merangkak naik, hentikan kenaikan itu dengan intervensi pasar," untkapnya.

Lalu yang kedua, lanjutnya, bagi masyarakat tidak mampu diberikan bantuan paket bahan. Dengan bantuan tersebut, minimal satu kepala keluarga

(KK) bisa bertahan tidak membeli kebutuhan pokok untuk sehari-hari selama satu minggu. "Akibatnya apa, itu tidak ada inflasi. Saya lihat metode ini yang benar," jelasnya.

Dirinya juga meminta para pejabat dari tingkatan bawah, seperti kepala desa, lurah maupun camat benar-benar memperhatikan masyarakat tidak mampu. Termasuk dari sisi kepesertaan BPJS kesehatan dan partisipasi untuk bersekolah.

"BPJS itu urus jangan

waktu sakit baru urus. Sekolah juga, sekolah itu termasuk penyumbang inflasi. Ketika masa penerimaan murid baru dan sebagainya. Jadi harus tahu kapan kita harus memberikan bantuan seragam. Itu waktunya harus pas," pesannya.

"Alhamdulillah Kalbar ini sudah mulai swasembada beras. Karena barang tersedia harga tidak terlalu meningkat, paling naik pun Rp100-200, itu pun harus diintervensi supaya tidak naik, kalau perlu deflasi," tutupnya. **(din)**